

Judul : Lima Tahun, Kinerja DPR Mengecewakan
Tanggal : Senin, 30 September 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 2

Lima Tahun, Kinerja DPR Mengecewakan

[JAKARTA] Kinerja anggota DPR periode 2014-2019 selama 5 tahun hingga mengakhiri masa tugasnya pada 30 September 2019, dinilai mengecewakan. Kelemahan menonjol masih pada pelaksanaan fungsi legislasi. Selain minimnya produk UU yang dihasilkan, RUU yang dibahas tidak sedikit yang berkaitan dengan kewenangan anggota Dewan.

Demikian rangkuman pandangan Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, peneliti Formapi Lusius Karus, analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto, dan pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin, saat dihubungi Senin (30/9).

Bayu menjelaskan, ada tiga alasan mendasar yang menyebabkan kinerja DPR mengecewakan. *Pertama*, target legislasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tidak pernah terpenuhi. Dari 189 RUU yang ditargetkan untuk dibahas dalam 5 tahun, DPR baru mengesahkan 91 UU atau 50%.

UU yang disahkan, lanjutnya, mayoritas di luar Prolegnas, atau yang masuk daftar kumulatif terbuka, seperti pengesahan perjanjian internasional tertentu, RUU sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi, RUU tentang APBN, serta penetapan atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). "Ketika pada akhir masa jabatan ini target tidak terpenuhi DPR berkilah bahwa mereka lebih menekankan aspek kualitas UU dibandingkan kuantitas. Namun, jangan lupa mereka sendiri pula yang menentukan target legislasi dalam Prolegnas di awal masa jabatan. Jika sejak awal prioritas pada kualitas seharusnya jumlah RUU yang ada dalam prolegnas tidak perlu sebanyak itu," ungkapnya.

Kedua, aspek kualitas pembentukan UU juga menunjukkan permasalahan. Menurut dia, bukan hanya UU kontroversial yang terjadi di akhir masa jabatan karena pembahasannya yang tiba-tiba, berlangsung tertutup, dan bertolak belakang dengan kehendak publik, namun sejak lama DPR periode 2014-2019 sebenarnya sudah membentuk UU yang mengandung masalah. Dicontohkan, dalam

perubahan UU MD3 awal tahun 2018 telah menjadikan DPR sebagai lembaga yang makin jauh dari rakyat dan antikritik, karena ada pasal yang bisa memerintahkan kepolisian panggil paksa dan menyandera orang yang tidak menghadiri panggilan DPR.

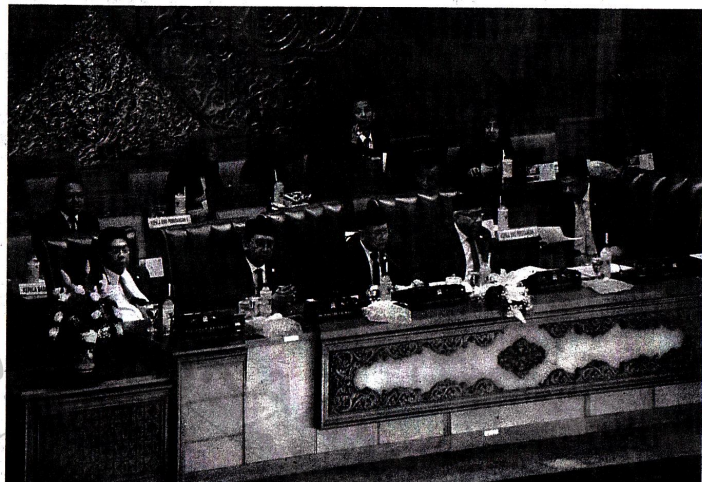
Selain itu, tambah Bayu, DPR seringkali mengatur kembali norma-norma yang sudah dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam membentuk UU. Dia merujuk UU Pemilu tahun 2017, di mana DPR mengatur kembali kewajiban verifikasi parpol hanya untuk parpol baru sementara parpol yang punya kursi di DPR tidak perlu.

Ketiga, soal keberpihakan atau politik hukum dalam pembentukan UU. Menurut dia, DPR periode 2014-2019 condong lebih fokus mengurus legislasi yang terkait dengan kepentingan dan bagi-bagi kuasa bagi anggota DPR sendiri. Dia mencontohkan, UU MD3 mencatatkan rekor sebagai UU yang paling sering direvisi di periode ini, yakni sebanyak tiga kali.

Hal senada disampaikan Lusius Karus. Menurutnya, yang paling penting untuk menilai kinerja legislasi adalah mengukur jumlah RUU Prolegnas yang disahkan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Target Prolegnas lima tahun berjumlah 189 RUU. Dengan hasil hanya mengesahkan 38 RUU, maka kinerja legislasi DPR kali ini memang buruk.

Apalagi dari 38 RUU tersebut, beberapa hanya merupakan ulangan RUU yang sama karena adanya revisi. Sebut saja misalnya RUU MD3 yang direvisi tiga kali dalam satu periode. Kemudian RUU Pilkada dan Pemda yang masing-masing direvisi selama dua kali. "Semua ini menunjukkan manajemen yang kacau dari pembahasan legislasi sekaligus menunjukkan kerja DPR yang tak sistematis, tidak fokus dan tidak terarah," jelas Lusius.

Dari fungsi anggaran, lanjut Lusius, DPR dirusak oleh ramainya korupsi selama proses pembahasan anggaran. Sementara dalam fungsi pengawasan juga maksimal karena DPR nyaris diduduki parpol pendukung pemerintah. Fungsi kontrol



Ketua DPR Bambang Soesatyo saat memimpin jalannya sidang akhir masa jabatan DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Sidang paripurna akhir masa jabatan DPR hari ini mengagendakan Ketua DPR Bambang Soesatyo akan berpidato sebagai salah satu agenda sidang serta pembahasan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian.

menjadi lemah karena mayoritas DPR justru menjadi bagian dari pendukung eksekutif.

Sementara itu, Arif Susanto mengemukakan masalah persepsi publik tentang DPR sebagian besar dipengaruhi kinerja DPR sendiri. Sebagai representasi rakyat, harapan terbesar rakyat adalah DPR dapat membaca kepentingan publik dan merefleksikannya dalam legislasi.

Ia menjelaskan, kinerja DPR kian memprihatinkan melihat tingginya ketidakhadiran anggota, terutama beberapa sesi sidang jelang berakhirnya masa jabatan. Namun, mengherankan sebelum terakhir terdapat 7 RUU disahkan dalam ketegesaan dan ketertutupan.

"Ini berkontribusi pada jarak menganga antara kehendak publik dan kepentingan elite," ujar Arif yang juga pengajar pada Universitas Paramadina, Jakarta ini.

Pada sisi lain, lanjut Arif, sebagai kasus korupsi juga membelit anggota DPR. Periode 2014-2019

saja terdapat 24 anggota DPR terjerat korupsi. Tidak cukup dengan korupsi, pelemahan pemberantasan korupsi pun coba dijalankan berulang lewat siasat legislasi, anggaran, bahkan pengawasan secara tidak proporsional.

Dia melihat menjadi kian memprihatinkan jika kinerja tersebut dibandingkan dengan peningkatan nyaris rutin alokasi anggaran DPR. Dalam tiga tahun terakhir, APBN mengalokasikan rata-rata lebih Rp 5 triliun per tahun bagi DPR. Sementara, sulit mendapati peningkatan kontribusi DPR bagi kehidupan bermasyarakat.

Pengawasan Publik

Secara terpisah, Silvanus Alvin meminta masyarakat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kinerja anggota DPR. Sebab, para anggota parlemen terkesan memanfaatkan apatisme publik selama lima tahun terakhir.

"Kalau masyarakat proaktifawasi DPR, maka kinerja parlemen akan positif. Aksi-aksi senyap pembahasan

undang-undang selama ini dapat dihindari," katanya.

Alvin pun menyebut, "Para anggota DPR masih belum menunjukkan kinerja secara optimal, karena mereka merasa masyarakat apatis. DPR mengawasi eksekutif, lantas siapa yang mengawasi DPR? Seharusnya kan rakyat karena mereka wakil rakyat."

Dia menuturkan, biaya politik yang tinggi juga menjadi faktor lain yang menyebabkan lemahnya kinerja DPR. "Gara-gara biaya yang bisa dibalang besar ini, setelah caleg terpilih dan duduk di DPR, mereka langsung memikirkan bagaimana balik modal. Jadi hanya tujuan politik yang diusahakan dan diutamakan. Bukan kepentingan rakyat," tukas Alvin.

Alvin menambahkan, tarik-menarik kepentingan politik dalam pembahasan legislasi pun kerap terjadi. Akibatnya, titik temu untuk mengesahkan suatu rancangan undang-undang (RUU) akhirnya tidak terjadi. [YUS/R-14/C-6]